

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah Ringkas Kabupaten Indragiri Hilir**

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah, provinsi, dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten dan kota. Salah satu kabupaten di Indonesia adalah kabupaten Indragiri, kalau dilihat dari sejarah kabupaten Indragiri mengalami perubahan pemerintahan dari priode kepriode, seperti priode sebelum penjajahan kolonial belanda (sebelum tahun 1945).

Zaman sebelum VOC Pemerintahan kolonial belanda datang dan memerintah di indonesia daerah Indragiri Hulu dan Teluk Kuantan merupakan Kerajaan. Kerajaan Indragiri diperintah oleh Raja atau Sultan yang berkedudukan di Pekan Tua yang terletak sekitar 75 Km sebelah timur kota rengat. Raja pertamanya adalah Raja Kocik Mambang alias Raja Melayu 1 yang memerintah dari tahun 1298 sampai tahun 1337 dan raja terakhir yang memerintah adalah Tengku Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Syeh. Wilayah Kerajaan Indragiri pada waktu itu meliputi Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu sekarang, kecuali Kecamatan Cerenti, Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik yang merupakan bagian dari Kerajaan Kuantan sedangkan Kuantan Singingi pada waktu itu termasuk wilayah I Kerajaan Siak.

Setelah VOC pada waktu itu, daerah ini dikuasai oleh pemerintah Belanda dengan nama Afdeling Indragiri yang pernah diperintah oleh seorang Afdeling yang terdiri dari :

1. Order Afdeling/ District Rengat.
2. Order Afdeling/ District Tembilahan
3. Order Afdeling/ District Teluk Kuantan

Order Afdeling ini dipakai oleh seorang District Hoofd. Masing-masing District dibagi dalam 4 Order District Hoofd atau disebut AMIR dalam wilayah kerajaan Indragiri. Karena luasnya wilayah dan sulitnya komunikasi serta untuk memperlancar roda pemerintahan daerah maka sultan mengangkat beberapa AMIR yang sekarang berubah menjadi Camat yaitu :

1. Amir yang berkedudukan di Kelayang untuk Order District Pasir Penyau
2. Amir yang berkedudukan di Rengat untuk Order District Rengat.
3. Amir yang berkedudukan di sungai salak untuk Order District Tempuling.
4. Amir yang berkedudukan di Tembilahan
5. Amir yang berkedudukan di Kateman.

Khusus untuk daerah Rantau Kuantan dimana daerah ini tidak berada dibawah kekuasaan Sultan Indragiri. Daerah ini diperintah oleh seorang citroleor yang berkedudukan di Teluk Kuantan dan Kuantan merupakan daerah otonom sendiri yang disebut dengan Kuantan Districion, (kerajaan yang hanya berkuasa memegang urusan adat, agama, pengadilan kecil dan urusan rakyat).

Priode selanjutnya yaitu zaman pemerintahan Jepang, dengan kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya dengan didudukinya Indonesia maka

beralih kekuasaan pemerintahan Jepang. Indragiri pada waktu itu berada dibawah kekuasaan Jepang, Penguasannya pada waktu itu disebut Bunshiho (bupati) dan dibantu oleh Gusaibu (Fatih) karena perpindahan Indragiri seakan-akan tidak ada lagi.

Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 maka di daerah-daerah dibentuk pula lembaga Ketata Negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bersifat :

1. Penyerahan wewenang sepenuhnya baik yang menyangkut kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan.
2. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat kepada aparat daerah.
3. Mengikutsertakan Organisasi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah membantu pelaksanaan urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatera Tengah dan Diralisi dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatera Tengah termasuk Kabupaten Indragiri. Kabupaten Indragiri pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanan Kuantan Singingi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1963 status

kewedanan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanan dalam Kabupaten Indragiri. Dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru.

Dengan dibentuknya Provinsi Riau dan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 maka timbullah didua kewedanan tersebut yaitu kewedanan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPR RI pusat. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi tiga kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan kecamatan, sekarang 11 kecamatan.
2. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan.
3. Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan terdiri dari 6 kecamatan.

Pada masa reformasi kabupaten Indragiri Hilir mengalami perkembangan yang sangat pesat dibawah pemerintahan seorang Bupati yang memiliki loyalitas dan etos kerja yang tinggi dengan mengedepankan kepentingan

masyarakat, terlihat dengan jelas pada hubungan reformasi pemerintahan dengan Desa yaitu:

“ Masyarakat desa dan pemerintahan desa, sehingga pemerintahan desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan republik Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa (Bhinneka Tunggal Ika). Disamping itu masyarakat desa wajib mendukung pemerintahannya dengan menaati keputusan-keputusan serta menaati tindakan-tindakan yang demokratis dan sekaligus dapat pula mengoreksi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.”

Selanjutnya didalam tiap daerah kabupaten dan kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut dengan desa dan kelurahan. dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten dan kota. Reformasi pemerintahan desa dimaksud untuk memperbaharui dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa.

#### **4.2 Sejarah Ringkas Kecamatan Sungai Batang**

Kecamatan sungai batang merupakan salah satu kecamatan dari 20 kecamatan yang terbentuk di kabupaten Indragiri Hilir. Kecamatan Sungai Batang adalah kecamatan yang termasuk baru dimekarkan dari kecamatan Reteh pada tahun 2006 yang membawahi 18 (delapan belas) desa atau kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan/Desa Mekar Sari
2. Kelurahan/Desa Pulau Kecil

3. Kelurahan/Desa Pulau Kijang
4. Kelurahan/Desa Pulau Ruku
5. Kelurahan/Desa Sanglar
6. Kelurahan/DesaSeberang Pulau Kijang
7. Kelurahan/Desa Seberang Sanglar
8. Kelurahan/Desa Sungai Asam
9. Kelurahan/Desa Sungai Terab/Terap
10. Kelurahan/Desa Sungai Undan
11. Kelurahan/Desa Benteng
12. Kelurahan/Desa Benteng Barat
13. Kelurahan/Desa Benteng Utara
14. Kelurahan/Desa Kula Patah Parang
15. Kelurahan/Desa Kuala Sungai Batang
16. Kelurahan/Desa Pesanggerahan
17. Kelurahan/ Desa Mugomulyo
18. Kelurahan/ Desa Pandan Sari

Kecamatan Sungai Batang sendiri sekarang membawahi delapan desa/ kelurahan yaitu Kelurahan/Desa Benteng ,Kelurahan/Desa Benteng Barat, Kelurahan/Desa Benteng Utara, Kelurahan/Desa Kula Patah Parang,

Kelurahan/Desa Kuala Sungai Batang, Kelurahan/Desa Pesanggerahan, Kelurahan/ Desa Mugomulyo dan Kelurahan/ Desa Pandan Sari.

Kabupaten Indragiri Hilir sendiri dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 pada tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49 ).Kabupaten Indragiri Hilir yang membawahi 20 (dua Puluh) kecamatan ini memiliki penduduk dengan beragam suku bahasa, yaitu suku Banjar, suku Bugis, suku Melayu, suku Minang, suku Batak dan suku Jawa.

#### 4.3 Letak Geografis

Berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir wilayah daratan (pulau-pulau) dari Kecamatan Sungai Batang terletak diantara 0 36' Lintang Utara, 1 07' Lintang Selatan, 104 10' Bujur Timur dan 102 30' Bujur Timur. Terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 Km<sup>2</sup> berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis.

Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan **"NEGERI SERIBU JEMBATAN"** dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak ditinggikan 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Tanjung Jabung Prov. Jambi.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Kepulauan Riau.

#### **4.4 Pemerintahan**

Terbentuknya kecamatan Sungai Batang merupakan suatu upaya untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kehadirannya sebagai institusi eksekutif yang akan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Wilayah kecamatan Sungai Batang memiliki jumlah penduduk 14.994 jiwa (2013) yang meliputi desa/kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan/Desa Benteng
2. Kelurahan/Desa Benteng Barat
3. Kelurahan/Desa Benteng Utara
4. Kelurahan/Desa Kula Patah Parang
5. Kelurahan/Desa Kuala Sungai Batang
6. Kelurahan/Desa Pesanggerahan
7. Kelurahan/ Desa Mugomulyo
8. Kelurahan/ Desa Pandan Sari



#### 4.5 Desa Mugomulyo

Desa Mugomulyo merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk 1652 jiwa dengan suku bahasa yang mayoritas suku Jawa. Terdiri dari 11 rukun tetangga (RT) dan 3 rukun warga (RW). Di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Tahun 2011 No. 6 dijelaskan bahwa :

(1) Desa Mugomulyo merupakan hasil pemekaran dari Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang.

(2) Luas wilayah Desa Mugomulyo adalah  $\pm 13.000 \text{ Km}^2$  (Tiga Belas Ribu Kilometer Persegi) dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Pusaran Kecamatan Enok
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Benteng
- d. Sebelah Barat : Desa Benteng Barat di Parit Melayu I dan Parit Melayu II

(3) Wilayah Desa Mugomulyo meliputi :

- a. Dusun Mekar I
- b. Dusun Mekar II
- c. Dusun Mugo Mulyo

(4) Ibu Kota Desa Mugomulyo terletak di Dusun Mugomulyo

Dengan terbentuknya Desa Mugomulyo, maka luas wilayah Desa Benteng Barat yang merupakan Desa Induk, menjadi  $\pm 22,28 \text{ Km}^2$  (Dua Puluh Dua koma Dua Puluh Delapan Kilometer Persegi) dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Pusaran Enok Kecamatan Enok

- b. Sebelah Selatan : Pulau Kijang Kecamatan Reteh
- c. Sebelah Timur : Desa Mugo Mulyo di Parit Melayu I dan Parit Melayu II
- d. Sebelah Barat : Desa Sanglar Kecamatan Reteh

Desa Mugomulyo memiliki beberapa tradisi dan adat istiadat yang dipelopori oleh suku penduduk jawa karena dapat dikatakan seluruh penduduk desa Mugomulyo bersuku bahasa jawa. Hasil bumi pada desa Mugomulyo adalah tanaman padi, kelapa sawit, kelapa Hibrida atau kelapa lokal dan beberapa tanaman sayuran.

Dengan ditertibkan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status desa menjadi Kelurahan disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya tujuan pembentukan desa adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan.

#### **4.6 Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berpotensi dan produktif bagi pembangunan ekonomi, serta menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan

dalam peningkatan kualitas hidup, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Pendidikan merupakan sarana mencerdaskan bangsa, karena melalui pendidikan setiap orang mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan keterampilannya untuk mengatur kehidupan kearah yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumberdayanya.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah dan tenaga pengajar mulai dari pendidikan sekolah Dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi Pendidikan merupakan konsep "*Link And Match*" yaitu pendekatan atau strategi dalam meningkatkan relevansi system pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan sesuai dengan tuntutan zaman dan mampu bersaing dalam teknologi yang semakin berkembang dengan pesat.

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Untuk lebih jelas mengenai pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Penduduk Di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir**

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Belum/Tidak Sekolah	232
2.	Tamat SD/Tidak	357
3.	SD Sederajat	1.480
4.	SLTP Sederajat	5.840
4	SLTA Sederajat	5.730
5.	D1/D2	751
6	S1	254
7.	S2	50
<b>Jumlah</b>		<b>14.994</b>

*Sumber Data : Kantor Camat Sungai Batang 2014*

Adapun jenjang sarana pendidikan didesa Mugomulyo itu sendiri sudah terbilang memadai untuk desa yang baru dimekarkan, mulai dari tingkat TK (Taman Kanak-kanak) hingga keperguruan tinggi (S-1). Dan apabila dibandingkan dengan desa induknya desa Benteng Barat maka jauh lebih baik, sebab didesa tersebut hanya dari tingkat SD sampai SMP saja.